



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018 NOMOR 17**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2018**



**SALINAN**

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 103);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya.
  - b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

Jenis layanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk layanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berupa Rekomendasi, diterbitkan berdasarkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan:
- a. urusan Pendidikan;
  - b. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
  - c. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - d. Urusan Sosial;
  - e. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  - f. Urusan Perhubungan;

- g. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - h. Tanda Daftar Usaha Budidaya;
  - i. Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan;
  - j. Bidang Peternakan;
  - k. Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian; dan
  - l. Bidang Hortikultura,
- tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait sampai dengan dilakukannya peralihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Perangkat Daerah terkait kepada DPMPTSP.
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
  - (3) Peralihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Berita Acara Serah Terima antara Perangkat Daerah terkait dengan DPMPTSP.
  - (4) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyusun rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati mengenai teknis perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 6 April 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 April 2018

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

| No. | Urusan Pemerintahan   | Layanan Perizinan   | Layanan Non Perizinan | Penyelenggara                  |
|-----|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| I.  | Urusan Pendidikan     |   |                       |                                |
| A.  | Pendidikan Formal     | 1 Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |                       | 2 Izin Pendirian SD   |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |                       | 3 Izin Pendirian SMP  |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
| B.  | Pendidikan Non Formal | 1 Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB)  |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |                       | 2 Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)                                     |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |                       | 3 Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis / SPS (PAUD Berbasis                       |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha |

| No. | Urusan Pemerintahan    | Layanan Perizinan                               | Layanan Non Perizinan | Penyelenggara                      |
|-----|------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
|     |                        | Pendidikan Agama)                               |                       |                                    |
| C.  | Pendidikan Informal    | 1 Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 2 Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)            |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 3 Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)       |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| II. | Urusan Kesehatan       |   |                       |                                    |
| A.  | Sarana Pelayanan Medis | 1 Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C           |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 2 Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D           |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 3 Izin Mendirikan Klinik Pratama                |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 4 Izin Mendirikan Klinik Utama                  |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 5 Izin Mendirikan Klinik Kecantikan             |                       | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|     |                        | 6 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C          |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                        | 7 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D          |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                        | 8 Izin Operasional Klinik Pratama               |                       | Bidang Perizinan                   |

| No. | Urusan Pemerintahan              | Layanan Perizinan  | Layanan Non Perizinan | Penyelenggara                      |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
|     |                                  |  |                       | Operasional Usaha                  |
|     |                                  | 9 Izin Operasional Klinik Utama  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 10 Izin Operasional Klinik Kecantikan  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 11 Izin Operasional Puskesmas  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 12 Izin Klinik Jamu  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| B.  | Sarana Pelayanan Penunjang Medis | 1 Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 2 Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiolog Diagnostik   |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 3 Izin Penyelenggaraan Optikal   |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 4 Izin Pelayanan Hemodialisis  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 5 Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik dan Zat Adiktif Terlarang. |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 6 Izin Operasional Pengendalian Vektor   |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                                  | 7 Izin Teknis Pelayanan Kesehatan  |                       | Bidang Perizinan                   |

| No. | Urusan Pemerintahan        | Layanan Perizinan                                       | Layanan Non Perizinan | Penyelenggara                      |
|-----|----------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
|     |                            | SPA Tradisional   |                       | Operasional Usaha                  |
|     |                            | 8 Izin Apotek   |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 9 Izin Pedagang Eceran Obat (PEO)                       |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 10 Izin Penyelenggaraan Usaha Obat                      |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 11 Izin Toko Alat Kesehatan                             |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| C.  | Tenaga Pelayanan Kesehatan |   |                       |                                    |
|     | Tenaga Medis :             | 1 Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi                     |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 2 Izin Praktik Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 3 Izin Praktik Dokter Internsip                         |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 4 Izin Pengobatan Komplementer - Alternatif             |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     | Tenaga Keperawatan :       | 1 Izin Pelayanan Perawat                                |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 2 Izin Pelayanan Bidan                                  |                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                            | 3 Izin Terapis Gigi dan Mulut                           |                       | Bidang Perizinan                   |

| <b>No.</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b>                          | <b>Layanan Perizinan</b>                          | <b>Layanan Non Perizinan</b> | <b>Penyelenggara</b>               |
|------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|
|            |   |   |                              | Operasional Usaha                  |
|            |   | 4 Izin Pelayanan Perawat Anastesi                 |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            | Tenaga Kefarmasian, Gizi dan Kesehatan Lingkungan : | 1 izin Apoteker                                   |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 2 Izin Asisten Apoteker                           |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 3 Izin Tenaga Gizi                                |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 4 Izin Tenaga Sanitarian                          |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            | Tenaga Keterampilan Fisik :                         | 1 Izin Fisioterapis                               |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 2 Izin Ortotis Prostetis                          |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 3 Izin Okupasi Terafis                            |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 4 izin Terafis Wicara                             |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 5 Izin Pengobatan Tradisional / HATRA (Akupuntur) |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |

| No. | Urusan Pemerintahan       | Layanan Perizinan   | Layanan Non Perizinan  | Penyelenggara                      |
|-----|---------------------------|---|--|------------------------------------|
|     | Tenaga Keteknisan Medis : | 1 izin Radiografer  |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           | 2 Izin Tenaga Refracionis Optisen / Optometris                |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           | 3 Izin Perekaman Medis  |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           | 4 Izin Teknisi Gigi   |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           | 5 Izin Analisis Kesehatan / Ahli Teknologi Laboratorium Medik |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| D.  | Kesehatan Tertentu        | 1 Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional                      | 1 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga                 | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           | 2 Surat Terdaftar Tukang Gigi                                 | 2 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel                           | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           |   | 3 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran        | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           |   | 4 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           |   | 5 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum                 | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |                           |   | 6 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga                       | Bidang Perizinan Operasional Usaha |

| No.  | Urusan Pemerintahan                      | Layanan Perizinan   | Layanan Non Perizinan   | Penyelenggara                      |
|------|--|---|---|------------------------------------|
|      |  |   | 7 Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| III. | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)   |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|      |  | 2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali IMB untuk Rumah Tinggal di luar Kawasan Perumahan sampai dengan luasan 250 m <sup>2</sup> dan Rumah Tinggal di Kawasan Perumahan yang sudah menjadi milik individu sampai dengan luasan 250 m <sup>2</sup> |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|      |  | 3 Izin Penyelenggaraan Reklame  |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|      |  | 4 Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)  |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|      |  | 5 Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama   |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| IV.  | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan      | 1 Izin Penyelenggaraan Pemakaman  |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |

| No.   | Urusan Pemerintahan | Layanan Perizinan   | Layanan Non Perizinan                      | Penyelenggara                      |
|-------|---------------------|---|--|------------------------------------|
|       | Permukiman          |   |  |                                    |
| V.    | Urusan Sosial       | 1 Izin Operasional Yayasan / Organisasi Sosial dan Panti                        |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|       |                     | 2 Izin Undian dan Sumbangan   |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| VI.   | Urusan Tenaga Kerja | 1 Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                                      |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|       |                     | 2 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)                    |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| VII.  | Urusan Pertanahan   | 1 Izin Lokasi   | 1 Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR) | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|       |                     |   | 2. Informasi Tata Ruang (ITR)              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| VIII. | Lingkungan Hidup    | 1 Izin Lingkungan   |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|       |                     | 2 Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Lain (IPBL)                     |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|       |                     | 3 Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ITPSB3) |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|       |                     | 4 Izin Pengumpulan Limbah B3  |  | Bidang Perizinan                   |

| No. | Urusan Pemerintahan  | Layanan Perizinan   | Layanan Non Perizinan  | Penyelenggara                      |
|-----|--|---|--|------------------------------------|
|     |  |   |  | Operasional Usaha                  |
| IX. | Urusan Perhubungan   |   |  |                                    |
| A.  | Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Izin Trayek) | 1 Izin Trayek Baru dengan Lintasan Trayek Baru  | 1. Rekomendasi Angkutan Umum Kewenangan Provinsi/Pusat (dalam Trayek AKDP/AKAP dan Tidak Dalam Trayek) | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |  | 2 Penambahan Izin Trayek Baru (Lintasan Trayek Eksisting)   |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |  | 3 Peremajaan / Penggantian Kendaraan  |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |  | 4 Pembaharuan Surat Keputusan Izin Trayek   |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |  | 5 Pembaharuan Kartu Pengawasan Izin Trayek  |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|     |  | 6 Perubahan Lintasan Trayek (Perubahan Lintasan, Perpendek/Perpanjang Lintasan) pada Izin Eksisting |  | Bidang Perizinan Operasional Usaha |

| <b>No.</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b>  | <b>Layanan Perizinan</b>   | <b>Layanan Non Perizinan</b> | <b>Penyelenggara</b>               |
|------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|
|            |   | 7 Permohonan Pindah Lintasan Trayek (Pada suatu Trayek ke Trayek yang lainnya yang sudah Ditetapkan) |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 8 Duplikasi Surat Keputusan dan atau Kartu Pengawasan karena Kehilangan / Rusak                      |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 9 Perubahan Data (Data Kendaraan / Kepemilikan)  |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 10 Peralihan Izin dari Perseorangan ke Badan Hukum   |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| B.         | Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Izin Operasi) | 1 Izin Operasi Baru dengan Wilayah Operasi Baru (Taksi Lokal dan Angkutan Kawasan Tertentu)          |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 2 Penambahan Izin Operasi Baru (Wilayah Operasi Eksisting)   |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 3 Peremajaan / Penggantian Kendaraan   |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 4 Pembaharuan Surat Keputusan Izin Operasi   |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |

| <b>No.</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b>                                    | <b>Layanan Perizinan</b>   | <b>Layanan Non Perizinan</b>  | <b>Penyelenggara</b>               |
|------------|---|--|---|------------------------------------|
|            |   | 5 Pembaharuan Kartu Pengawasan Izin Operasi  |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 6 Perubahan Wilayah Operasi  |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 7 Pindah Wilayah Operasi   |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 8 Duplikasi karena Kehilangan / Rusak  |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 9 Perubahan Data (Data Kendaraan / Kepemilikan)  |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|            |   | 10 Peralihan Izin dari Perseorangan ke Badan Hukum   |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| C.         | Pelayanan Izin Insidentil (Dispensasi Keluar Lintasan Trayek) | Izin Insidentil (Dispensasi Keluar Lintasan Trayek)  |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| X.         | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                     | 1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)   | 1. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu / Kantor Kas | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|            |   | 2. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Usaha Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |

| <b>No.</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b>    | <b>Layanan Perizinan</b>   | <b>Layanan Non Perizinan</b> | <b>Penyelenggara</b>               |
|------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
|            |                               | 3. Izin Buka Kantor Cabang Koperasi                                      |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| XI.        | Urusan Penanaman Modal        | 1 Izin Prinsip Penanaman Modal (IP-PM)                                   |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|            |                               | 2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IP-Perluasan)                  |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|            |                               | 3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (IP-Perubahan)                  |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|            |                               | 4 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (IP-Penggabungan) |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| XII.       | Urusan Kelautan dan Perikanan | 1 Izin Usaha Perikanan (IU-Perikanan)                                    |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| XIII.      | Urusan Pariwisata             | 1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)                                 |                              | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| XIV.       | Urusan Pertanian              |  |                              |                                    |
| A.         | Bidang Perkebunan             | 1 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB)                            |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|            |                               | 2 Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPP)                          |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
|            |                               | 3 Izin Usaha Perkebunan (IUP/Terintegrasi)                               |                              | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |

| No. | Urusan Pemerintahan                        | Layanan Perizinan                         | Layanan Non Perizinan  | Penyelenggara                  |
|-----|--|---|--|--------------------------------|
|     |  | 4 Izin Konversi                           |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 5 Izin Diversifikasi                      |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 6 Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan     |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 7 Izin Luas Lahan                         |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 8. Tanda Daftar Usaha Budidaya            |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 9. Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
| B.  | Bidang Peternakan                          | 1. Izin Usaha Peternakan                  | 1. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan (Bibit Ternak)                      | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 2. Izin Perluasan Usaha                   |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 3. Persetujuan Prinsip                    |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 4. Tanda Daftar Peternakan                |  | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
| C.  | Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian | 1 Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri       | 1. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Asal Hewan (Pangan dan Non Pangan) | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|     |  | 2 Izin Praktek Dokter Hewan Bersama       | 2. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan (Non Bibit)                         | Bidang Perizinan Memulai Usaha |

| <b>No.</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b> | <b>Layanan Perizinan</b>  | <b>Layanan Non Perizinan</b>                            | <b>Penyelenggara</b>           |
|------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|
|            |                            | 3 Izin Rumah Sakit Hewan  | 3. Rekomendasi Nomor Kontrol VETERINER (NKV)            | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 4 Izin Klinik Hewan   | 4. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara      | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 5 Izin Laboratorium Keswan dan Kesmavet                               |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 6 Izin Rumah Sakit Hewan Khusus                                       |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 7 Izin Tenaga Kesehatan Bukan Dokter Hewan                            |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 8 Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara asing                      |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 9 Izin Depo Obat Hewan  |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 10 Izin Toko Obat Hewan   |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 11 Izin Petshop / Poultry Shop  |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 12. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
|            |                            | 13. Izin Usaha Pasar Hewan  |   | Bidang Perizinan Memulai Usaha |
| D.         | Bidang Hortikultura        | 1 Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura                            | 1. Rekomendasi Kebutuhan Benih Kentang Impor (Atlantik) | Bidang Perizinan Memulai Usaha |

| <b>No.</b>    | <b>Urusan Pemerintahan</b> | <b>Layanan Perizinan</b>                      | <b>Layanan Non Perizinan</b>              | <b>Penyelenggara</b>               |
|---------------|----------------------------|---|---|------------------------------------|
| XV.           | Urusan Perdagangan         | 1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)         |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|               |                            | 2 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)               |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|               |                            | 3 Tanda Daftar Gudang (TDG)                   |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|               |                            | 4 Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)             |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|               |                            | 5 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|               |                            | 6 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)        |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
| XVI.          | Urusan Perindustrian       | 1 Izin Usaha Industri (IUI)                   |   | Bidang Perizinan Operasional Usaha |
|               |                            |   | 1 Surat Keterangan Kawasan Berikat (SKKB) | Bidang Perizinan Memulai Usaha     |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>135 Layanan Perizinan</b>                  | <b>18 Layanan Non Perizinan</b>           |                                    |

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER